

The Intellectual's Contribution In The National Movement Of In Indonesian 1908-1928

Dwi Nur Imsawati ^a, Sri Handayani^b, Sumardi ^c

^a History Education Program, Jember University,

^b History Education Program, Jember University, srihandayani@unej.ac.id

^c History Education Program, Jember University, sumardi.fkip@unej.ac.id

Abstract

Intellectual is Indonesian youths who are educated and fight for his nation. Intellectual's brought a new way struggle of Indonesian nation which no longer rely on physical but on ability and intellectual. Emerging of national movement pioneered by intellectual who have got Dutch colonial government's education. The problems in this research are the factors behind the emerging of the intellectual and the contribution of the learned classes in the national movement of Indonesia. This research aims to describe about the role of intellectual in the national movement of Indonesia on 1908-1928. This research method uses historical research method, which consists of four steps: heuristics, criticism, interpretation and historiography. The benefits of this research to increase knowledge and can be used as a reference for the next research. The conclusion that can be drawn from this research is the first factor that is the background of intellectual emerging is the implementation of ethical politics policy and the implementation of Dutch colonial education in Indonesia. The Dutch government provides opportunities for the people of Indonesia to obtain an education. Second, intellectual's contribution in the national movement of Indonesia which include education sector, economic sector, social sector and emerging of national awareness for nation and state.

Keywords: Contribution, Intellectual, National Movement

PENDAHULUAN

Golongan terpelajar merupakan pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik atau pemuda-pemuda Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan. Menurut Kurniadi (1987:12) pemuda merupakan aset nasional yang memiliki potensi untuk membangun bangsa melalui pendidikan. Tujuan utama pemerintah kolonial Belanda memberikan pendidikan kepada golongan bumiputra adalah untuk mendapatkan tenaga terdidik dengan biaya yang murah. Pemerintah Belanda menginginkan anak-anak Indonesia menjadi pegawai yang dipengaruhi oleh budaya Barat. Golongan terpelajar membawa cara baru perjuangan bangsa Indonesia yang tidak lagi mengandalkan fisik melainkan mengadakan kemampuan intelektual yang dimiliki.

Golongan terpelajar yang mendapatkan pendidikan dengan cara Barat mendapat tempat terhormat dalam masyarakat. Golongan terpelajar dianggap sebagai orang yang dapat dijadikan panutan, tempat bertanya dan orang yang dibanggakan berkat ilmu yang dimiliki. Pertumbuhan dan perkembangan golongan terpelajar di daerah dapat dikatakan terlambat, akibatnya pertumbuhan organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan juga terlambat (Soedarto, 1978:26). Pergerakan nasional di Indonesia dipelopori oleh golongan terpelajar yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Lahirnya pergerakan nasional tidak dapat dipisahkan kebijakan politik etis dan pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda memberikan kontribusi terhadap pemenuhan pendidikan di Indonesia. Anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan untuk bersekolah sampai pada tingkat menengah bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana faktor yang melatar belakangi lahirnya golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional Indonesia tahun 1908-1928 dan bagaimana kontribusi golongan terpelajar dalam pergerakan nasional di Indonesia tahun 1908-1928. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam faktor yang melatar belakangi lahirnya golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional Indonesia tahun 1908-1928, dan mengkaji lebih dalam kontribusi golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional Indonesia tahun 1908-1928. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: bagi civitas akademi universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

tentang peranan golongan terpelajar dalam pergerakan nasional Indonesia tahun 1908-1928 dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya; bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar ataupun sumber materi Sejarah Nasional Indonesia dalam proses pembelajaran; bagi almamater FKIP Universitas Jember, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KAJIAN LITERATUR

Golongan terpelajar lahir sebagai akibat pelaksanaan kebijakan-kebijakan politik etik dan pelaksanaan pendidikan kolonial belanda di Indonesia. Dewantara (1962:54) dalam bukunya yang berjudul “Karja Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan menjelaskan bahwa pengajaran Barat dan intelektualisme melahirkan golongan terpelajar yang dapat membangkitkan semangat pemuda-pemuda Indonesia untuk melakukan suatu gerakan. Dr. Sotomo melalui organisasi Budi Utomo memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Golongan terpelajar berharap dengan banyaknya pemuda-pemuda Indonesia yang memperoleh pendidikan dapat mempercepat kemajuan bangsanya. Golongan terpelajar berupaya agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran nasional yang tinggi terhadap bangsanya melalui pendidikan.

Hatta (1980:9) dalam buku yang berjudul “Permulaan Pergerakan Nasional” menjelaskan tentang munculnya pergerakan nasional Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Pergerakan nasional mempunyai asas tujuan dan ideologi yaitu menciptakan masyarakat yang maju. Pergerakan nasional dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yaitu politik etis. Kesadaran nasional mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan suatu gerakan, baik yang berasaskan politik maupun sosial budaya. Gerakan awal yang didirikan pada masa pergerakan nasional yaitu organisasi Budi Utomo yang bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Said dan Mansoer (1953:177) dalam buku yang berjudul “Mendidik dari Zaman ke Zaman” menjelaskan bahwa pendidikan yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda tidak membuat rakyat puas dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankan. Awal abad ke-20

kesadaran nasional mulai tumbuh dikalangan pemuda yang telah mendapat pendidikan. Golongan terpelajar mulai bergerak untuk mengadakan perhimpunan dalam wadah organisasi dalam melawan penjajah. Golongan terpelajar muncul sebagai penggagas dan pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi yang didirikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh historiografi (Gottschalk, 1986:32). Terdapat empat langkah penelitian sejarah, yaitu: 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; dan 4) historiografi.

Langkah pertama yaitu heuristik atau pengumpulan data. Pada langkah ini penulis berusaha mencari berbagai sumber sejarah yang berkaitan dengan “Peranan Golongan Terpelajar dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928”. penelitian ini merupakan studi literatur terkait dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, skripsi, dan Internet. Langkah kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik sumber merupakan kegiatan untuk mengkaji otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik adalah langkah yang berfungsi untuk menyeleksi atau menyelidiki sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah baik dari segi fisik maupun isinya untuk dijadikan fakta sejarah. Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern (Kartodirjo, 1992:16). Kritik ekstern dilakukan untuk menilai sumber-sumber yang ada. Kritik intern dilakukan untuk menilai isi dari sumber apakah relevan dari masalah atau tidak.

Langkah ketiga yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah interpretasi. Interpretasi merupakan cara menentukan fakta-fakta yang saling berhubungan, sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional berdasarkan aspek permasalahan. Proses analisis kajian menggunakan pendekatan dan teori. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah sosiologi dan teori peran. Langkah terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 2007:76). Historiografi yang dilakukan peneliti adalah merekonstruksi peristiwa yang benar-benar terjadi menjadi kisah berdasarkan fakta-fakta

sejarah yang berkaitan dengan “Peranan Golongan Terpelajar dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928”.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Faktor yang Melatar Belakangi Lahirnya Golongan Terpelajar pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928

1) Kebijakan Politik Etis

Politik etis secara resmi ditetapkan pada bulan September 1901, ketika Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Politik etis di pusatkan membangun irigasi, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan pendidikan (Soemanto & Soeyarno, 1983:46). Politik etis menuntun bangsa Indonesia kearah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda. Awal mula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, bahwa Belanda memperhatikan pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Kebijakan-kebijakan politik etis dipegang oleh beberapa Gubernur Jendral antara lain:

A. Kebijakan Johannes Benedictus Van Heutsz (1904- 1909)

Gubernur Jendral Van Heutsz mengganti perjanjian panjang dengan perjanjian pendek setiap kali memasukkan daerah kewilayah kekuasaan Belanda. Perjanjian pendek yang diajukan oleh Van Heutsz antara lain: a)menguasai daerah sebagai bagian dari Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda; b) tidak membuka hubungan dengan kekuasaan asing; c) mematuhi semua pemerintah (Simbolon, 2007:196). Syarat-syarat yang diajukan memudahkan untuk memudahkan penertiban didaerah-daerah agar dapat berjalan dengan teratur dan cepat, baik diwilayah Jawa maupun luar Jawa.

Kebijakan pendidikan di bawah pemerintahan Van Heutsz diubah menjadi lebih praktis, terutama dikalangan masyarakat Indonesia. Pendidikan praktis awalnya dimaksudkan untuk sekolah kejuruan, namun kebijakan pendidikan tidak bisa diubah begitu saja kearah yang lebih praktis (Simbolon, 2007:225). Van Heutsz berusaha menyebarkan pendidikan dalam skala yang lebih luas, dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Jawa, selain itu juga diajarkan ketrampilan. Guru-guru diambil dari kalangan pribumi.

Gubernur Jendral Van Heutsz mendirikan Sekolah Desa, walaupun awalnya banyak keberatan dengan didirikannya sekolah Desa. Van Heutsz menginstruksikan Direktur

Departemen Pengajaran serta Direktur Dalam Negeri untuk mempelajari rencananya. Kedua Direktur berpendapat bahwa pemerintah harus memberikan bantuan finansial, desa dijadikan satu-satunya yang bertanggung jawab atas didirikannya Sekolah Desa (Nasution, 2014:78). Percobaan dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan Sekolah Desa, maka bantuan dari berbagai pihak pemerintah maupun instansi yang terkait sangat di perlukan.

B. Alexander Willem Frederik Indenburg (1909-1916)

Masa pemerintahan Alexander Willem Frederik Indenburg menjadi Gubernur Jendral banyak berbagai macam sekolah rendah bagi anak-anak Indonesia di dirikan. Sekolah-sekolah tersebut berdiri sendiri tanpa ada ikatan organisasi antara sekolah satu dengan sekolah lain dan tanpa adanya jalan untuk melanjutkannya (Nasution, 2014:32). Indenburg berkeinginan bahwa anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan tanpa adanya pemisahan golongan. Indenburg berusaha agar sekolah-sekolah tersebut mempunyai hubungan antara satu sama lain dan terorganisasi dengan baik.

C. Kebijakan Johan Paul Van Limburg Stirum (1916-1921)

Gubernur Jndral Van limburg Stirum dikenal sebagai Gubernur Jendral yang bersifat toleran terhadap kemajuan Indonesia. Van Limburg Stirum menjanjikan akan mengadakan komisi perubahan yang akan meninjau *Volksraad* dan struktur administrasi pemerintahan Indonesia. Tindakan Van Limburg Stirum mengakibatkan rekasi hebat di negeri Belanda, karena dianggap tidak bertanggung jawab (Poesponegoro & Notosusanto, 2008:59). Van Limburg Stirum menginginkan perubahan terhadap bangsa Indonesia tanpa adanya kekerasan. Masa pemerintahan Van Limburg Stirum mendirikan sekolah AMS, alasannya agar lulusan MULO memperoleh pendidikan yang sama dengan HBS, sehingga memperoleh kesempatan untuk memasuki universitas.

D. Kebijakan Dirk Fock (1921-1926)

Dirk Fock merupakan Gubernur Jendral Belanda yang yang menjabat tahun 1921-1926. Dirk Fock sering mengecam kebijakan yang dijalankan oleh Van Limburg Stirum terutama di bidang politik kesejahteraan dan upayanya mendorong kehidupan politik yang lebih demokratik bagi bangsa Indonesia. Kebijakan Dirk Fock juga menindak keras pergerakan nasional (Simbolon, 2007:323). Organisasi-organisasi pergerakan dilarang beroperasi, khususnya organisasi pergerakan yang menentang pemerintah Kolonial

Belanda. Masa pemerintahan DirkFock disebut juga masa penindasan, karena Dirk Fock selalu bertindak untuk kepentingan pengusaha dan banyak merugikan rakyat.

E. Kebijakan Andries Cornelis Dirk De Graeff (1926-1931)

Andries Cornelis Dirk De Graeff merupakan Gubernur Jendral yang menyatakan tujuan utama pemerintahannya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang diakibatkan oleh pemerintahan Dirk Fock. Gubernur De Graeff sangat menghormati organisasi pergerakan yang menurutnya berbeda dengan gerakan komunis (Simbolon, 2007:359). Golongan terpelajar seakan mendapat kebebasan untuk dapat menggabungkan diri kedalam berbagai organisasi pergerakan nasional. Masa pemerintahan De Graeff industri Barat mengalami perluasan yang mengakibatkan golongan Barat ingin hidup sendiri terbebas terpisah dari golongan pribumi, sehingga menimbulkan berbagai pertentangan. Pertentangan dipertajam dengan adanya pertentangan golongan, pertentangan nasional dan pertentangan ras.

Implementasi Sistem Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia

Pelaksanaan politik etis memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan yang didirikan belanda didorong oleh kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah kolonial Belanda bukan untuk memajukan rakyat Indonesia (Nasution, 2014:17). pemerintah kolonial Belanda memerlukan pegawai yang mempunyai pendidikan dan tingkat kecerdasan, namun pendidikannya tidak terlalu tinggi sebab akan menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial Belanda. Kemajuan pendidikan akan dapat mengatasi berbagai masalah, namun pada saat itu pendidikan masih terbatas pada tingkat golongan atas.

A. Pelaksanaan Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia

Politik etis memberikan kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Belanda di dorong oleh kebutuhan yang diperlukan pemerintah kolonial Belanda. Penerapan pendidikan kolonial Belanda di Indonesia mempunyai beberapa ciri meliputi:

a. Gradualisme

Gradualisme dalam sistem pendidikan Belanda berarti pemerintah memperlambat dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya

perhatian terhadap sistem pendidikan pada awal abad ke-19 (Nasution, 2014:21). Perhatian pendidikan ditujukan pada anak-anak Belanda saja, sedangkan anak-anak Indonesia kurang mendapat perhatian. Alasan Pemerintah Belanda memperlambat perkembangan sekolah antara lain: 1) pendidikan bagi jutaan murid akan memakan biaya jutaan Gulden; 2) urusan penduduk diserahkan kepada raja masing-masing; 3) pejabat Belanda bersifat konservatif untuk mempertahankan status quo; 4) adanya anggapan pendidikan yang semakin maju akan membahayakan pemerintah kolonial Belanda.

b. Dualisme

Dualisme sistem pendidikan di Hindia Belanda artinya ada dua pembagian baik secara rasial maupun sosial. Keadaan mulai berubah pada tahun 1919 ketika ketua kongres pendidikan menentang sistem dualisme pendidikan. Menurut ketua kongres pendidikan seharusnya pendidikan didasarkan atas kemampuan individual untuk menjamin kerjasama yang baik antar berbagai bangsa. Van De Venter dan menteri Fock memperjuangkan adanya satu undang-undang hukum tujuannya untuk menghapus sistem dualisme, yaitu perbedaan perlakuan antara orang Belanda dan orang Indonesia (Nasution, 2014:27).

c. Kontrol Sentral yang Kuat

Pemerintah memegang peranan penting dalam pendidikan, perubahan pendidikan tidak akan terjadi tanpa adanya persetujuan Gubernur Jendral atau Dewan Pendidikan yang bertindak atas nama pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Jendral bertanggung jawab kepada raja diwakili oleh menteri jajahan (Nasution, 2014:27). Gubernur Jendral di bantu oleh sejumlah pegawai negeri yang terbagi dalam sembilan departemen. Gubernur Jendral eksekutif tertinggi berhak mengeluarkan peraturan atas persetujuan menteri jajahan. Akibat pengawasan yang ketat dari menteri jajahan Gubernur jendral cenderung mengawasi administrasi pusat dengan ketat untuk kseselamatan dirinya. Gubernur Jendral dibantu dalam fungsi legislatif dan eksekutif oleh suatu badan penasehat yang disebut *Raad Van Indie*.

d. Keterbatasan Tujuan

Keterbatasan tujuan maksudnya pelaksanaan pendidikan hanya sebagai penyedia pegawai pemerintah yang terdidik. Sekolah pertama untuk anak-anak Indonesia di dirikan dengan tujuan untuk mendidik anak-anak aristokrasi Jawa menjadi pegawai perkebunan pemerintah. Perluasan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan

juru tulis yang terus meningkat (Nasution, 2014:29). Kebutuhan pemerintah akan pegawai yang terdidik menjadikan pemerintah kolonial Belanda membuka kesempatan untuk anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan.

e. Prinsip Konkordansi

Prinsip konkordansi bertujuan untuk menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda (Nasution, 2014:31). Hal ini dimaksudkan agar mempermudah anak-anak Belanda yang bersekolah di Hindia Belanda untuk pindah sekolah mengikuti orang tuanya, jika mereka kembali ke Belanda. Sekolah-sekolah Belanda di Indonesia berhasil mencapai standarisasi seperti sekolah-sekolah di negeri Belanda. Persamaan kurikulum ini berlaku untuk sekolah rendah dan sekolah menengah.

f. Perencanaan Pendidikan yang tidak Sistematis

Pendidikan pada masa pemerintahan Kolonial Belanda tidak didasari adanya struktur organisasi yang teratur, sebab pendirian lembaga pendidikan hanya sebagai wujud usaha pemerintah untuk mempermudah dalam pelaksanaan politiknya. Pendidikan bukan syarat utama bagi anak-anak pribumi, namun atas dasar kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Munculnya lembaga pendidikan menjadikan masyarakat berpacu untuk meningkatkan intelektual bangsa Indonesia, walaupun kebijakan pendidikan masih terbatas.

B. Golongan Terpelajar yang Lahir dari Pendidikan Kolonial Belanda

Lahirnya golongan terpelajar merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia. Golongan terpelajar berupaya membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai diskriminasi yang dilakukan penjajah. Golongan terpelajar berupaya membangkitkan kesadaran masyarakat akan rasa nasionalisme melalui pendidikan. Pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda melahirkan golongan terpelajar yang berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa contoh tokoh golongan terpelajar yang lahir dari pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda:

a. Dr. Soetomo

Soetomo lahir di Ngepeh, Nganjuk pada tanggal 30 Juli 1888 (Kamanjaya, 1981:27). Pendidikan awal Soetomo sekolah di ELS, dan melanjutkan ke STOVIA yang merupakan sekolah dokter Jawa. Tanggal 20 Mei Soetomo dan teman-temannya pelajar STOVIA atas

dorongan Wahidin Sudirohusodo mendirikan organisasi yang diberi nama Budi Utomo (Pringgodigdo, 1994:1). Dr. Soetomo merupakan golongan terpelajar yang lahir dari pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda. Pendidikan Belanda telah membawa pengaruh terhadap sikap dan pemikiran Soetomo.

b. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)

Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Suwardi Suryaningrat berasal dari lingkungan keluarga kraton (Soeratman, 1986:11). Ki Hajar Dewantara mengawali pendidikannya dengan menempuh sekolah dasar di ELS. Tamat dari sekolah ELS Ki Hajar Dewantara melanjutkan ke *Kweek School*, kemudian melanjutkan sekolahnya ke STOVIA, namun pada tahun 1910 dikeluarkan karena beasiswanya di cabut. Pada tahun 1908 Ki Hajar Dewantara bergabung dengan organisasi Budi Utomo, ketika masih menjadi pelajar STOVIA. Suwardi Suryaningrat merupakan golongan terpelajar yang lahir akibat pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda. Suwardi Suryaningrat sangat menaruh perhatiannya terhadap kemajuan pendidikan, hal ini dibuktikan dengan usahanya untuk mendalami masalah pendidikan dan pengajaran.

c. Moh Hatta

Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Pendidikan awal Mohammad Hatta menempuh pendidikan dasar di *Fort De Kock* (Sekolah Melayu) (Hatta, 1980:30). Mohammad Hatta merupakan golongan terpelajar yang lahir dari pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda. Mohammad Hatta merupakan keturunan dari ulama dan pedagang terpandang di daerahnya. Mohammad Hatta saat menempuh pendidikannya di Negeri Belanda juga aktif dalam organisasi *Indische Vereniging*.

d. Mohammad Syafe'i

Mohammad Syafe'i lahir di Ketapang pada tahun 1899. Pendidikan yang ditempuh Syafe'i adalah sekolah raja di Bukit Tinggi (Djumhur dan Danasuparta, 1976:187). Mohammad Syafe'i bergabung dengan organisasi Perhimpunan Indonesia dan menjabat sebagai ketua seksi pendidikan. Mohammad Syafe'i tertarik menjadi seorang pendidik, hal ini dibuktikan dengan pada saat menempuh pendidikannya Mohammad Syafe'i juga

mengajar di sekolah Kartini. Mohammad Syafe'i berkeinginan mendirikan sekolah untuk rakyat Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

Kontribusi Golongan Terpelajar dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928

Golongan terpelajar yang lahir akibat penjajahan Belanda memegang peranan penting dalam pergerakan nasional. Golongan terpelajar berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang antara lain:

1) Kontribusi Golongan Terpelajar dalam Bidang Pendidikan

Rakyat pribumi awalnya menolak terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Belanda, namun jika menolak maka kemajuan pendidikan tidak akan tercapai. Dr. Wahidin berusaha untuk menemui orang-orang terkemuka untuk membicarakan kemungkinan mengadakan *Studie Fonds* (Dana Belajar) yang akan memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk dapat melanjutkan pendidikan dan pengajaran (Agung & Suparman, 2016:27). Dana Belajar tersebut diharapkan dapat menambah lahirnya golongan terpelajar yang kelak akan bergerak untuk kemajuan bangsanya. Dr. Wahidin melalui organisasi Budi Utomo memperjuangkan kemajuan dan perluasan pendidikan.

K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah yang dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Islam yang menyimpang dari tuntunan agama yaitu Alqur'an dan Hadist (Djumhur & Danasuparta, 1976:164). Hal ini diakibatkan kondisi masyarakat yang miskin dan tidak berpendidikan karena penjajahan. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas sebagai gerakan agama. Pendidikan Muhammadiyah mampu bersaing dengan pendidikan-pendidikan yang lebih maju tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

Sekolah Taman Siswa di dirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Suwardi Suryaningrat atau yang biasa dikenal dengan nama KI Hajar Dewantara. Taman Siswa di dirikan di Yogyakarta dengan nama *National Onderwijs Taman Siswa* (Djojonegoro, 1995:41). Perkembangan dan kemajuan sekolah Taman Siswa sangat pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah yang lebih dulu berdiri menyerahkan sekolahnya kepada Taman Siswa. Belanda mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah perluasan pengaruh Taman Siswa di masyarakat. Mohammad Syafe'i mendirikan sebuah perguruan yang diberi nama

Indonesische Nederlandsche School (INS) Kayutanam. Mohammad Syafe'i beranggapan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya untuk mencerdaskan Intelektualnya saja tidak dalam praktik maupun ketrampilan.

2) Kontribusi Golongan Terpelajar dalam Bidang Ekonomi

Awal abad ke-20 pemerintah kolonial mencurahkan perhatiannya teradap perencanaan dan pelaksanaan politik etis. Pelaksanaan kebijakan politik etis memerlukan rencana yang matang dan anggaran yang memenuhi (Poesponegoro & Notosusanto, 2010:158). Pemerintah kolonial membentuk suatu komite untuk menyelidiki keadaan ekonomi rakyat jajahan. Dasar awal politik etis adalah usaha untuk membalas budi bangsa Indonesia, namun pada kenyataannya hal tersebut hanya semata-mata rencana yang tidak terlaksana secara utuh. Politik etis hanya memnerika harapan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan kebebasan politik yang lebih.

Eksplotasi yang dilakukan oleh penjajahan kolonial menimbulkan reaksi-reaksi dikalangan golongan terpelajar. Penjajah melakukan tindakan-tindakan ekonomi hanya untuk melindungi kepentingan kolonial di bidang ekonomi (Kartodirjo, 1999:233). Kepentingan penjajah lebih diutamakan dari pada kepentingan rakyat jajahan. Kepentingan tersebut menyebabkan kondisi hidup rakyat jajahan yang terbelakang, akibat pelaksanaan eksploitasi dan diskriminasi pemerintah kolonial Belanda. Keadaan dalam negeri Indonesia telah memperlihatkan perkembangan ekonomi yang meningkat.

Diskriminasi dan eksploitasi yang dilakukan penjajahn Belanda menimbulkan usaha-usaha kearah emansipasi ekonomi. Diskriminasi dan eksploitasi dikalangan rakyatmenimbulkan rasa benci dikalangan golongan terpelajar. Mohammad Hatta berusaha meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hatta beranggapan bahwa penjajah ingin menguagai seluruh hasil negeri jajahan. Mohammad Hatta bersama dengan golongan terpelajar melakukan reaksi sebagai wujud dari kekecewaan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda secara besar-besaran di tanah jajahan Indonesia.

3) Kontribusi Golongan Terpelajar Munculnya Kesadaran Nasional untuk Berbangsa dan Bernegara

Lahirnya golongan terpelajar merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia dalam upaya membebaskan bangsanya dari tangan penjajah. Kemiskinan lahir dan batin menggerakkan golongan terpelajar untuk mempertinggi derajat bangsa. Kesadaran nasional mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Golongan terpelajar Indonesia sebagai elite intelektual yang menyadari bahwa perlunya perubahan dalam bentuk perjuangan yang awalnya mengandalkan fisik diganti dengan perjuangan yang menggunakan wadah organisasi.

Sistem kolonial berlawanan dengan demokrasi dan pemerintah kolonial tidak boleh memberikan prioritas kepada kepentingan modal kolonial dari pada kepentingan rakyat jajahan. Golongan terpelajar mulai sadar bahwa kekuasaan politis diperlukan untuk memaksa pemerintah kolonial memperhatikan kesejahteraan rakyat. Aspirasi politik mulai tampak ketika golongan terpelajar mendirikan organisasi pergerakan yang bernama Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ambil bagian dalam mengatur kehidupan rakyat dan memperbaiki nasibnya, namun peraturan kolonial tidak mengizinkan organisasi-organisasi pergerakan untuk terjun dalam bidang politik.

Tahun 1922 kondisi politik ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia sangat mengkhawatirkan, sehingga Suwardi mengikuti kongres *All Indie* dengan maksud agar bangsa Indonesia dapat memperoleh pemerintahan sendiri. Suwardi Suryaningrat memberi gambaran mengenai kondisi masyarakat yang menderita akibat peraturan pemerintah kolonial yang kejam dan sewenang-wenang (Soeratman, 1986:71). Golongan terpelajar beranggapan perlu menyusun kekuatan rakyat untuk mengambil alih kekuasaan politik. Golongan terpelajar mengambil keputusan bahwa organisasi pergerakan nasional harus menuju kearah Indonesia merdeka, sedangkan kerjasama dengan pemerintah kolonial ditolak.

4) Kontribusi Golongan Terpelajar dalam Bidang Sosial

Perubahan ekonomi dan politik yang dipengaruhi sistem kolonial dan modernisasi menimbulkan perkembangan dalam masyarakat Indonesia. Kedudukan sosial dan nilai-nilai yang mengarahkan perbedaan tindakan dalam perubahan tersebut. Elite lama seperti

ulama, bangsawan, elite aristokrasi merasa terancam kedudukan dan kepentingannya. Fungsi mereka semakin berkurang meskipun kedudukan mereka tetap tinggi dikalangan masyarakat Indonesia (Kartodirjo, 1999:87). Fungsi birokrasi hanya sebagai perantara penguasa asing dengan rakyat. Perubahan politik serta nilai-nilainya menjadikan birokrasi tidak lagi berfungsi sebagai pusat kegiatan dan kebudayaan. Keterikatan pada tingkat birokrasi sudah tidak ada lagi golongan elite profesiobal memperoleh status sosial dengan gaya priyayi. Kemajuan mulai tersebar dengan tumbuhnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Kemajuan tersebut akan dapat tercapai melalui pendidikan. Perkembangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan karena pendidikan.

Pertumbuhan nasionalisme menjadikan organisasi menjadi alat untuk melawan penjajahan kolonial. Pembentukan organisasi-organisasi pergerakan di dorong oleh pertentangan kepentingan sosial dengan kaum penjajah. Pergerakan nasional dipandang sebagai suatu proses nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Golongan terpelajar mendirikan organisasi pergerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar terbebas dari tangan penjajah. Organisasi pergerakan dibawah naungan golongan terpelajar mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari pergerakan nasional menuju masyarakat yang merdeka. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa pendidikan berfungsi sebagai pembentuk kesadaran nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Faktor yang melatar belakangi lahirnya golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional adalah kebijakan politik etis dan implementasi sistem pendidikan kolonial Belanda di Indonesia. Politik etis secara resmi di tetapkan pada bulan september 1901 ketika Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato tahunan. Implementasi sistem pendidikan kolonial Belanda di Indoensia di dasarkan pada enam ciri yaitu: 1) gradualisme, 2) dualisme, 3) kontrol sentral yang kuat, 4) keterbatasan tujuan, 5) prinsip konkordansi, 6) perencanaan pendidikan yang tidak sistematis. Golongan terpelajar yang lahir akibat pelaksanaan pendidikan kolonial Belanda antara lain: Dr. Sotomo, Suwardi Suryaningrat, Mohammad Hatta, Mohammad Syafe'i.

Kontribusi golongan terpelajar yang lahir dari pelaksanaan pendidikan Belanda dalam pergerakan nasional antara lain: Suwardi Suryaningrat dan Mohammad Syafe'i berkontribusi dalam bidang pendidikan. Mohammad Hatta berkontribusi di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Suwardi Suryaningrat dalam usaha pembentukan negara berupaya untuk memperjuangkan kebebasan bangsanya dari tangan penjajah.

Saran

Berdasarkan penelitian, saran yang dikemukakan penulis yaitu: bagi pembaca, sebagai bangsa yang besar harus menghargai jasa pahlawan, sebaiknya nilai-nilai perjuangan dapat kita ambil sebagai suri tauladan; bagi mahasiswa calon guru, dapat dijadikan sumber belajar yang mengkaji lebih dalam mengenai peranan golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional Indonesia; bagi pemuda, diharapkan dapat mencontoh sikap, semangat kebangsaan dari golongan terpelajar pada masa pergerakan nasional Indonesia dan dapat melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dwi Nur Imsawati mengucapkan terimakasih banyak kepada Dr. Sri Handayani, M.M. dan Dr. Sumardi M.Hum. yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan sekaligus saran dengan penuh kesabaran demi terselesainya jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman sekalian yang telah membantu penulis dan memberikan semangat, motivasi, serta dukungan untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Agung, L. & Suparman, T. 2016. *Sejarah Pendidikan*. Cetakan Kedua. Jogjakarta: Ombak.
- Dewantara, K.H. 1962. *Karja Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan*. Jogjakarta: Madjelis Luhur Taman Siswa.
- Djumhur & Danasuparta. 1976. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu Bandung.
- Djojonegoro, W. 1996. *Lima Puluh tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

- Gootschalk, L. 1969. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Oleh Nugroho Notosusanto 1986. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hatta, M. 1980. *Permulaan Pergerakan Nasional*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Kamanjaya. 1981. *Tiga Perintis-Pelopor Pahlawan Nasional*. Yogyakarta: UP Indonesia.
- Kartodirdjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirjo, S. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniadi, E. 1987. *Peranan Pemuda dalam Pembangunan Politik di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Nasution,S. 2014. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poeponegoro, M.D. & Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pringgodigdo, A.K. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Said, M. 1981. *Pendidikan Abad Kedua puluh dengan Latar Belakang Kebudayaananya*. Jakarta: Mutiara.
- Simbolon, P. T. 2007. *Menjadi Indonesia*. Jakarta:P.T. Gunung Agung.
- Soedarto, dkk. 1979. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Soemanto, W. & Soeyarno, F.X. 1983. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeratman, D. 1986. *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta:Depdikbud.